

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN MELALUI PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

Firma Sulistiyowati

Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
Mrican, Caturtunggal Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
e-mail: firma_sulistiyowati@yahoo.com

Pendahuluan

Aktivitas yang dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah sosial telah banyak dilakukan, hal tersebut tercermin dari berbagai organisasi yang didirikan untuk menampung aktivitas tersebut. Berbagai organisasi sosial mencoba mengadopsi ilmu manajemen dalam organisasi bisnis untuk menjalankan aktivitasnya, kecuali pada visi dan misi yang bercirikan kepentingan sosial.

Berdasarkan pengamatannya di Amerika Serikat, Drucker (1985) dalam bukunya yang berjudul *Innovation and Entrepreneurship* menyimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran yang tidak dapat dihindari dari masa ekonomiberdasarkan manajemen ke ekonomi berdasarkan kewirausahaan, misalnya dalam hal penyediaan lapangan kerja. Dahulu pencipta lapangan kerja adalah perusahaan-perusahaan besar. Namun kini perusahaan kecil dan menengah, bahkan mungkin usaha mikro justru menjadipenyedia lapangan kerja.

Perhatian dan upaya dalam mengembangkan wirausaha dan kewirausahaan juga makinmeningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya penelitian dan jumlah insitusipendidikan yang menawarkan program kewirausahaan pada tingkat fakultas maupun program studi. Pusat pengembangankewirausahaan juga semakin bertambah jumlahnya. Transfer ilmu manajemen dari organisasi bisnis keorganisasi sosial terjadi juga pada bidang kewirausahaan. Penghargaanantahunan kepada wirausaha bisnis

“unggul” diadakan oleh banyak institusi, misalnya yang dilakukan oleh *Ernst and Young*, yang menambah jenis penghargaan yang diberikan dengan menobatkan wirausaha sosial sebagai salah satu kategori penghargaan (Winarto, 2008).

Salah satu tanda pengakuan yang sangat luar biasa pada wirausaha sosial ialah terpilihnya Mohammad Yunus, sang pionir sistem kredit mikro yang ditujukan untuk para perempuan pengusaha skala mikro, sebagai penerima hadiah Nobel perdamaian tahun 2006 lalu. Banyaknya masalah sosial yang terjadi sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan ekonomi maupun keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah sosial, menjadi suatu tantangan yang sangat nyata bagi dunia akademisi maupun praktisi untuk meningkatkan keterlibatannya dalam mencari jalan keluar atas masalah sosial tersebut.

Kewirausahaan Sosial

18 Rumusan tentang kewirausahaan sosial telah didefinisikan oleh organisasi dan ahli yang menggumuli bidang tersebut. Misalnya, *Ashoka Fellows*, yang didirikan oleh Bill Drayton tahun 1980, menyebutkan karakteristik kegiatan wirausaha sosial sebagai berikut (Winarto, 2008).

1. Tugas wirausaha sosial adalah mengenali adanya kemacetan atau kemandegan dalam kehidupan masyarakat dan menyediakan jalan keluar dari kemacetan atau kemandegan itu. Wirausaha sosial menemukan apa yang tidak berfungsi, memecahkan masalah dengan mengubah sistemnya, menyebarluaskan pemecahannya, dan meyakinkan seluruh masyarakat untuk berani melakukan perubahan.
2. Wirausaha sosial tidak puas dengan hanya memberi “ikan” atau mengajarkan cara “memancing ikan”, tetapi wirausaha sosial tidak akan diam sampai “industri perikanan” pun berubah.

3 Hal yang dilakukan oleh Mohammad Yunus dalam mengembangkan bank untuk melayani kaum miskin merupakan suatu inovasi yang bertentangan dengan kaidah yang umumnya menjadi

target pasar bank, yaitu mereka yang mampu dan berisiko kecil. Kemacetan akses pada dana yang dihadapi oleh kaum miskin telah dipecahkan dengan penyediaan sistem kredit mikro yang ditujukan kepada mereka dalam polakelompok.

Suatu terobosan lain dilakukan oleh seorang lulusan sekolah dokter yang bernama Sofyan Tan. Sofyan Tan berusaha mengatasi kebuntuan hidup berdampingan antara etnis Cina dengan etnis setempat di Medan, dengan mendirikan sekolah di daerah miskin. Sekolah yang muridnya campuran antar etnis tersebut, khususnya dari kalangan miskin, merupakan hal yang baru. Menurut Sofyan Tan, penduduk miskin lebih sulit berintegrasi dengan etnis lain dibandingkan dengan penduduk yang berpendidikan tinggi. Suatu hal yang wajar jika pada awalnya ada yang meragukan kualitas sekolah tersebut. Dengan sistem orang tua asuh yang berasal dari etnis lain, sekolah tersebut telah menghasilkan lulusan yang mampu masuk ke perguruan tinggi negeri yang menjadi kebanggaan sekolah berpredikat sekolah unggulan. Di website *Ashoka Fellow*, organisasi tersebut menyajikan informasi bahwa jumlah anggotanya mencapai 1.800 orang di 60 negara. Karena usaha dan kerja kerasnya tersebut, Sofyan Tan menjadi salah satu penerima *Ashoka Fellow*, dengan salah satu misi yang diembannya adalah mengembangkan profesi kewirausahaan sosial di dunia pendidikan.

Gregory Dees, seorang professor di Stanford University dan pakar di bidang kewirausahaan sosial menyatakan bahwa kewirausahaan sosial merupakan kombinasi dari semangat besar dalam misi sosial dengan disiplin, inovasi, dan keteguhan seperti yang lazim berlaku di dunia bisnis (Winarto, 2008). Kegiatan kewirausahaan sosial dapat meliputi kegiatan (Winarto, 2008): a) yang tidak bertujuan mencari laba, b) melakukan bisnis untuk tujuan sosial, dan c) campuran dari kedua tujuan itu, yakni tidak untuk mencari laba, dan mencari laba, namun untuk tujuan sosial.

Pengembangan Kewirausahaan Sosial.

Sejumlah upaya pengembangan wirausaha bisnis dapat menjadi acuan untuk pengembangan wirausaha sosial. Sebagaimana telah

diyakini oleh para ahli di bidang pengembangan kewirausahaan, agar tercipta wirausaha yang profesional, akan lebih cepat dan baik jika tidak hanya mengandalkan bakat saja, melainkan diharapkan para wirausahawan juga aktif mencoba, belajar dari jejaring sosial, dan belajar dari sumber formal.

Kasus pengembangan kewirausahaan sosial oleh Kelompok Tani Wanita Menur di Desa Wareng, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat menjadi sumber inspirasi bagi para penggiat kewirausahaan sosial. Adanya partisipasi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial mereka, terbukti dapat mempercepat pemecahan masalah sosial yang saat ini mengalami kemacetan atau kemandegan.

Tulisan Prahalad (2005), seorang akademisi di The University of Michigan Business School, dalam bukunya: "*The Fortune at The Bottom of The Pyramid*" dapat menjadi sumber inspirasi tentang cara perusahaan dan perguruan tinggi berpartisipasi dalam pemecahan masalah sosial. Prahalad menulis, bila kita berhenti berpikir bahwa kaum miskin adalah korban atau beban, dan mulai menganggap mereka sebagai wirausaha yang ulet dan kreatif, peluang besar yang baru akan terbuka.

Hambatan Penerapan Kewirausahaan Sosial

Hambatan yang harus dihadapi untuk suatu inovasi sosial yang radikal adalah tembok birokrasi dan kenyamanan dari pelaku dalam sistem yang telah 'mapan' saat ini. Di negaranya, Bangladesh, Mohammad Yunus menghadapi sistem lintah darat. Ia menghadirkan sistem perbankan baru bagi masyarakat miskin, khususnya kaum perempuan. Demikian juga Sofyan Tan, ia menghadapi pesimisme dari mereka yang terbiasa mengenali adanya sekolah unggulan bagi masyarakat mampu, bukan masyarakat miskin, sehingga ia mengalami banyak kesulitan dalam mendapatkan sponsor. Kasus Kelompok Tani Wanita Menur juga menghadapi berbagai hambatan, diantaranya budaya tentang peran wanita sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Meskipun perubahan yang dilakukan oleh ibu-ibu Menur tergolong dalam inovasi yang bersifat tidak sangat

radikal, tetapi tetap tidaklah bebas dari risiko. Mereka harus secara kreatif menciptakan sistem keseimbangan baru. Gagasan baru cara bertani dan berorganisasi yang baik perlu dikomunikasikan ke suami agar dapat diterima.

Tembok yang harus diruntuhkan oleh wirausaha sosial dengan mengadakan inovasi tidak sama tingginya. Hal ini mirip dengan apa yang dihadapi oleh wirausaha bisnis yang ingin unggul dan harus menghadapi lingkungan dan sistem yang tidak selaluraham. Salah satu contoh menghadapi tembok yang tinggi adalah kasus Steve Jobs yang ingin menghadirkan komputer pribadi (*personal computer*). Ia harus berhadapan dengan perusahaan raksasa komputer pada masa itu. Besar kecilnya inovasi dan risiko yang akan dihadapi merupakan bagian yang harus diperhitungkan oleh semua wirausahawan.

Dalam tulisan ini, penulis mengangkat kasus pemberian kredit usaha mikro bagi para pengusaha mikro yang mayoritas perempuan melalui program Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) di Kecamatan Sewon Bantul sebagai salah satu bentuk kewirausahaan sosial. Aktivitas kewirausahaan sosial tersebut dilakukan untuk mengatasi kebuntuan, terutama dalam menghadapi masalah permodalan dan teknis usaha yang dihadapi oleh mayoritas perempuan pengusaha mikro.

Pemberian Kredit Usaha Mikro bagi Perempuan Pedesaan melalui Program Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) di Kecamatan Sewon Bantul sebagai Salah satu Bentuk Kewirausahaan Sosial

Usaha mikro mempunyai peranan yang penting dan cukup kuat dalam menopang perekonomian Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan tetap bertahannya usaha mikro saat terjadi krisis ekonomi yang telah banyak mematikan usaha-usaha besar. Namun, kenyataannya perkembangan usaha-usaha mikro belum begitu maksimal jika dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai oleh usaha-usaha besar karena terbatasnya akses untuk mengembangkan usaha-usaha mikro itu sendiri, diantaranya masalah permodalan, perijinan usaha, promosi, keterampilan para pengusaha mikro.

Perkembangan usaha mikro diharapkan akan membantu penyerapan tenaga kerja, yang setidaknya dapat menurunkan angka pengangguran di suatu daerah, atau dengan kata lain usaha mikro memberikan sumbangan kinerja perekonomian bagi pemerintah daerah. Hal tersebut memberi harapan bahwa kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat di suatu daerah akan meningkat, sejalan dengan berkembangnya usaha-usaha mikro. Di lain pihak, kemampuan usaha-usaha mikro yang mayoritas berada di pedesaan dalam menyumbangkan kinerjanya bagi pemerintah daerah tentu tidak lepas dari kondisi usaha mikro itu sendiri, selain peran pemerintah, maupun faktor pendukung lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak khususnya dari pemerintah untuk mengembangkan usaha-usaha mikro. Dukungan-dukungan tersebut misalnya dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau, memberikan pelatihan keterampilan, maupun membantu dalam proses promosi.

Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa masalah yang sering dihadapi masyarakat pedesaan dalam mengembangkan usahanya yaitu adanya keterbatasan modal. Modal merupakan faktor utama dalam mendukung proses kinerja usaha-usaha mikro tersebut. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa keterbatasan modal akan menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan usaha-usaha mikro di pedesaan. Persoalan tersebut akan semakin berat jika pelaku usaha mikro adalah perempuan. Hal tersebut disebabkan karena selain persoalan teknis usaha, termasuk di dalamnya modal, perempuan juga mengalami persoalan struktural yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang seringkali kurang adil bagi dirinya (Sulistiyowati, 2005:74). Hal ini dapat menjadi peluang dilaksanakannya aktivitas kewirausahaan sosial.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan modalnya, masyarakat pedesaan seringkali meminjam uang dari beberapa rentenir yang tersebar di desa-desa. Meminjam uang dari rentenir memang masih menjadi daya tarik tersendiri karena syarat peminjaman yang dirasakan cukup mudah dan bisa mendapatkan uang pinjaman yang cukup besar. Namun, kemudahan tersebut hanya akan

dirasakan pada awal peminjaman saja dan selanjutnya peminjam harus mengembalikan uang dalam jumlah yang cukup besar kepada rentenir karena bunga yang ditetapkan juga cukup besar. Hal itulah yang seringkali menjadi kesulitan bagi masyarakat pedesaan untuk mengembalikan pinjamannya (utangnya). Disamping itu, keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman kepada rentenir juga akan berakibat disitanya barang-barang jaminan dan kekayaan lainnya yang dimiliki beserta bunga cukup besar yang masih harus dibayar.

Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain adalah mendirikan beberapa lembaga pengkreditan rakyat, yang diharapkan dapat membantu dalam penyediaan modal bagi usaha-usaha mikro. Pendirian lembaga-lembaga pengkreditan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi jumlah pengusaha mikro yang meminjam uang kepada rentenir, yang akan menyulitkan mereka dalam hal pengembalian pinjaman. Dengan hadirnya lembaga yang dikelola pemerintah, seperti koperasi unit desa (KUD), koperasi simpan pinjam, koperasi tani, dan lain sebagainya, diharapkan akan memudahkan para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usaha mereka. Selain lembaga-lembaga tersebut, ada pula Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) yang berada pada setiap kecamatan dalam satu lingkup kabupaten atau kota Yogyakarta. Dengan adanya BUKP, masyarakat yang mengelola usaha mikro akan dengan mudah mendapatkan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya dengan syarat dan bunga yang tidak terlalu memberatkan mereka, jika dibandingkan dengan meminjam pada rentenir. Dengan begitu, pemerintah mengharapkan bahwa para pelaku usaha mikro akan tetap bertahan bahkan terus berkembang, sehingga kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti (2012) tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendapatan penjualan usaha mikro sebelum dan sesudah menerima kredit dari BUKP dan untuk mengetahui pengaruh kredit yang diberikan melalui BUKP terhadap pendapatan penjualan usaha mikro. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t dua rata-rata sampel berpasangan (*paired sample t-test*), dan analisis regresi linier sederhana (*linear regression analysis*). Uji-t dua rata-rata sampel berpasangan digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendapatan penjualan usaha mikro sebelum dan sesudah menerima kredit dari BUKP, sedangkan analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh kredit yang diberikan melalui BUKP terhadap usaha mikro dalam hal pendapatan penjualan usahanya.

Penelitian tersebut di atas mengambil sampel 30 responden penerima kredit dari BUKP Sewon Bantul, yang dikelompokkan berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis usaha, tingkat pendidikan dan besarnya kredit adalah sebagai berikut.

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur Responden	Jumlah	%
1	41 - 50 tahun	4	13
2	51 - 60 tahun	8	27
3	61 - 70 tahun	18	60
Total		30	100

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	10	33
2	Perempuan	20	67
Total		30	100

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah	%
1	Makanan	19	63
2	Lainnya	11	37
Total		30	100

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

No.	Pendidikan Akhir	Jumlah	%
1	SD	16	53
2	SMP	9	30
3	SMA	5	17
Total		30	100

5. Deskripsi Responden Berdasarkan Besarnya Kredit

No.	Besarnya Kredit	Jumlah	%
1	Di atas rata-rata plafon kredit	13	43
2	Di bawah rata-rata plafon kredit	17	57
Total		30	100

Total plafon kredit dari ke 30 responden tersebut yaitu sebesar Rp 83.000.000,00, dengan rata-rata plafon kredit sebesar Rp 2.766.667,00. Besarnya jumlah kredit dikelompokkan menjadi dua, yaitu kredit di atas rata-rata plafon kredit dan kredit di bawah rata-rata plafon kredit. Kredit di atas rata-rata plafon kredit meliputi jumlah kredit yang sama dengan atau di atas Rp 2.766.667,00, sedangkan kredit di bawah rata-rata plafon kredit meliputi jumlah kredit di bawah Rp 2.766.667,00. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 57% responden besar kreditnya di bawah rata-rata plafon kredit, dan sebanyak 43% besar kreditnya di atas rata-rata plafon kredit. Hal tersebut menunjukkan, bahwa sebagian besar responden memiliki jumlah kredit di bawah rata-rata plafon kredit atau di bawah Rp 2.766.667,00.

Berdasarkan perhitungan regresi linier sederhana yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pemberian kredit oleh lembaga keuangan mikro seperti BUKP sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan penjualan para pengusaha mikro. Walaupun mayoritas dari responden (57%) hanya mengajukan kredit di bawah rata-rata plafon kredit, namun mereka benar-benar telah memanfaatkan kredit tersebut guna memperlancar usahanya, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan penjualan mereka.

Faktor umur dan rendahnya pendidikan, ternyata tidak menyurutkan niat mereka dalam menjalankan usaha. Dari informasi

yang telah tergal, diketahui bahwa 60% responden berumur sekitar 61 sampai 70 tahun, di mana pada rentang umur tersebut biasanya seseorang sudah menikmati masa tuanya di rumah bersama keluarga. Namun, ternyata mereka memilih untuk terus menjalankan usaha di usia tua mereka demi tercukupinya kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal. Di samping itu, walaupun pendidikan dari 53% responden hanya berakhir pada tingkat Sekolah Dasar (SD), namun hal tersebut bukan merupakan hambatan bagi jalannya usaha mereka. Dalam kenyataannya, pengusaha mikro yang sudah berusia lanjut tetap dapat mengetahui jumlah uang, walaupun kurang memiliki kemampuan dalam hal membaca.

Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 67%. Hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar pengusaha mikro yang ada di Kecamatan Sewon Bantul adalah perempuan dan berusia lanjut. Perempuan pengusaha mikro dan usia lanjut seringkali menjadi pertimbangan yang menyulitkan pihak perbankan dalam mengotorisasi pencairan kredit karena perempuan dianggap sebagai pihak yang lemah dan menjadi tanggungan laki-laki, selain berbagai alasan lain yang menyulitkan pengusaha mikro untuk mendapatkan kredit dari perbankan, yaitu:

1. Tidak memiliki persyaratan yang memadai
2. Tidak memiliki agunan yang cukup
3. Biaya transaksinya mahal/tinggi
4. Lokasi kelompok miskin tidak berada dalam jangkauan kantor cabangnya

Berdasarkan data yang ada, karena mayoritas pengusaha mikro di Kecamatan Sewon Bantul adalah perempuan, sebanyak 63% memiliki usaha di bidang makanan, seperti berjualan sembako, roti, daging, tiwul, dan warung makan, karena mereka memiliki pandangan bahwa berusaha di bidang makanan akan lebih bertahan daripada berusaha di bidang lainnya seperti penjualan hewan ternak, baju, dan peralatan rumah tangga.

Melalui kondisi-kondisi yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa BUKP telah berperan dalam membantu para pengusaha mikro dalam meningkatkan usaha mereka. Peranan kredit BUKP dapat terlihat dari meningkatnya produk-produk yang dijual, pembukaan lapak atau toko baru, dan variasi produk yang telah dilakukan. Selain membantu dari sisi permodalan, demi terus berkembangnya usaha mikro, pemerintah juga telah melakukan berbagai pendampingan melalui dinas terkait, seperti penyuluhan dalam hal pemasaran produk, dan bagaimana memulai usaha baru. Berbagai hal yang telah dilakukan pemerintah tersebut tentu bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro, dengan harapan usaha mikro dapat berkembang menjadi usaha kecil, menengah, hingga besar.

Penutup

Kasus pemberian kredit usaha mikro bagi para pengusaha mikro yang mayoritas perempuan pedesaan berusia lanjut melalui Program BUKP di Kecamatan Sewon dapat digunakan sebagai contoh aktivitas kewirausahaan sosial yang harus digalakkan oleh pemerintah maupun pihak lain yang peduli terhadap kehidupan perempuan pengusaha mikro. Karena melalui aktivitas tersebut terbukti mampu mengatasi kebuntuan maupun kemandegan modal dan masalah teknis usaha yang dihadapi oleh perempuan, terutama perempuan pengusaha mikro dan terbukti dapat meningkatkan pendapatan penjualan mereka.

Dengan berkembangnya usaha mikro yang semakin meningkat menjadi usaha kecil maupun menengah, bahkan besardiharapkan dapat ¹² menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Jika semakin banyak orang yang bekerja, maka pemerataan pendapatan diharapkan dapat segera terwujud, dan mendatangkan kesejahteraan khususnya bagi penduduk di wilayah Kecamatan Sewon.

Daftar Pustaka

- Drucker, Peter. 1985. *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. William Heinemann Ltd.
- Indriastuti, Novia. 2012. Pengaruh Pemberian Kredit oleh Badan Usaha Kredit Pedesaan terhadap Pendapatan pada Penjualan Usaha Mikro (Studi Kasus pada BUKP Kecamatan Sewon, Bantul Tahun 2011). *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Jennings, Daniel. 1994., *Multiple Perspectives of Entrepreneurship: Text, Readings, and Cases*. South-Western Publishing Co.
- Lowe, Robin dan Sue Marriot. 2006. *Enterprise: Entrepreneurship and Innovation, Concepts, Contexts, and Commercialization*, Butterworth-Heinemann, hal 18 - 20 dan 65 - 84.
- Prahalad, C.K. 2005. *The Fortune at The Bottom of the Pyramid*. Wharton School Publishing
- Sulistiyowati, Firma. 2005. *Pengembangan Lembaga Kredit Mikro yang Berperspektif Gender*. dalam buku *Reposisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Nasional*, Penerbit Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hal 73-90.
- Timmons, Jeffry and Stephen Spinelli. 2007. *New Venture Creation, Entrepreneurship for the 21st Century*. 7th ed., McGraw-Hill Education, International. Wickham,
- Philip. 2004. *Strategic Entrepreneurship*. 3rd ed., Pearson Education Limited, 2004, hal. 110.
- Winarto, V. 2008. *Membangun Kewirausahaan Sosial: "Meruntuhkan dan Menciptakan Sistem Secara Kreatif?"*. Makalah dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Academy Professorship Indonesia bidang Ilmu Sosial-Humaniora dan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 22 Februari.

KWU Sosial

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	adoc.pub Internet Source	2%
2	nanopdf.com Internet Source	1%
3	960606net.blogspot.com Internet Source	1%
4	dedibrave09.wordpress.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
6	anzdoc.com Internet Source	1%
7	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
9	gadis.co.uk Internet Source	1%

10	andibismillah.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	eprints.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
12	fekonunismuh.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	slideplayer.info Internet Source	<1 %
14	achyars.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
16	. Nusril, M. Mustopa Romdhon, Indra Cahyadinata. "Studi Evaluasi Pelaksanaan Dan Kelembagaan Pelaksana Program Bengkulu Regional Development Project (BRDP)", Jurnal AGRISEP, 2005 Publication	<1 %
17	Dwi Purnamasari, Ashabul Kahfi, Arief Fatchur Rachman. "PERAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015 Publication	<1 %
18	sandiasagede.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On